



Rabu, 7 April 2021

1. Asuransi Jiwasraya Segera Beralih
Bisnis Indonesia, hal. 15 / 07-04-2021

Bisnis Indonesia Rabu, 7 April 2021

| TERBITKAN LAPORAN KEUANGAN |

Asuransi Jiwasraya Segera Beralih

Bisnis, JAKARTA — PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menerbitkan laporan keuangan 2020 dan memperoleh opini wajar. Dalam laporan keuangan tersebut, tidak terdapat catatan perolehan premi dan pembayaran klaim.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh *Bisnis*, laporan keuangan Jiwasraya itu ditetapkan oleh direksi pada 31 Maret 2021. Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono menyematkan opini wajar terhadap laporan keuangan 2020 itu.

Dalam laporan keuangan 2020 tidak terdapat catatan nilai premi dan klaim dari Jiwasraya. Namun, laporan itu mencantumkan data 2019 dengan nilai perolehan premi Rp3,08 triliun dan pembayaran klaim Rp14,8 triliun.

Adapun, Jiwasraya mencatatkan adanya pendapatan lain senilai Rp1,89 triliun.

Akun itu menyumbang jumlah pendapatan mencapai Rp1,9 triliun atau turun 9,8% (*year on year/yoy*) dari sebelumnya Rp2,1 triliun.

Akun pendapatan lain mencakup pendapatan dari operasi yang dihentikan, juga beban usaha lainnya senilai Rp5,58 triliun yang memuat biaya dari operasi yang dihentikan.

"Laporan keuangan ini disajikan dengan menggunakan PSAK 58, sehubungan dengan rencana pengalihan bisnis PT Asuransi Jiwasraya [Persero] ke perusahaan baru yang merupakan anak PT BPUI [Persero]," tulis laporan itu dikutip Selasa (6/4).

Total aset Jiwasraya tercatat senilai Rp15,7 triliun atau turun 13,3% (*yoy*) dibandingkan dengan sebelumnya senilai Rp18,1 triliun. Penurunan itu dipengaruhi oleh berkurangnya nilai investasi perseroan.

Nilai investasi pada 2020 tercatat Rp2,1 triliun, berkurang hingga 85,6% (*yoy*) dari sebelumnya Rp14,9 triliun. Instrumen investasi yang tersisa pun hanya deposito berjangka senilai Rp547,8 miliar serta bangunan dan tanah untuk investasi senilai Rp1,6 triliun.

Direktur Keuangan Jiwasraya Farid Azhar Nasution menjelaskan bahwa tidak tercantumnya nilai premi, klaim, dan sejumlah instrumen investasi merupakan bentuk implementasi PSAK 58 dalam penyampaian laporan keuangan 2020.

"Ini terkait penerapan PSAK 58," ujar Farid kepada *Bisnis*, Selasa (6/4).

Meskipun nilai investasinya menurun, hasil investasi Jiwasraya pada 2020 justru mencatatkan kinerja positif. Tahun lalu Jiwasraya membukukan hasil investasi Rp33,5 miliar. (Wibi P. Pratama)

2. [Foto] AXA Mandiri Optimalkan Digitalisasi
Bisnis Indonesia, hal. 15 / 07-04-2021

FINANSIAL 15

■ AXA MANDIRI OPTIMALKAN DIGITALISASI



Bisnis/Abdurachman

Karyawan melayani nasabah di kantor cabang Axa Mandiri, Jakarta, Selasa (6/4). PT Axa Mandiri Financial Services (Axa Mandiri) akan mengoptimalkan peluang digitalisasi dalam memasarkan produk asuransi termasuk menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah. Layanan digital

memegang peranan penting pada kinerja perusahaan pada masa pandemi Covid-19. Pada 2020, Axa Mandiri mencatatkan kinerja klaim asuransi sebesar Rp4,8 triliun. Jumlah klaim yang dibayarkan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan 2019, yang mencapai Rp5,3 triliun.

3. **87% Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya Setuju Direstrukturasasi**
Investor Daily, hal. 23 / 07-04-2021

87% Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya Setuju Direstrukturasasi



R Mahelan Prabantarikso

JAKARTA – Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kembali mengumumkan perkembangan program restrukturisasi polis. Sampai 30 Maret 2021, terdapat 87% atau sebanyak 15.123 pemegang polis Jiwasraya kategori *bancassurance* telah mengikuti program restrukturisasi polis.

Jumlah itu meningkat dari data yang disampaikan per 9 Maret 2021 bahwa sudah terdapat 73% atau sebanyak 12.808 pemegang polis *bancassurance* yang sudah mengikuti restrukturisasi polis. Bahkan sebelumnya, pada 18 Januari 2021, baru 406 pemegang polis *bancassurance* yang menyatakan setuju untuk polisnya direstrukturasasi.

Selain itu, sampai 30 Maret 2021 Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya juga mencatat sekitar 71% atau 131.111 peserta dari kategori pemegang polis korporasi yang telah memberikan persetujuan untuk mengikuti program restrukturisasi polis Jiwasraya. Sebelumnya pada 9 Maret 2021 terdapat sebanyak 128.766 peserta atau mencakup 62% pemegang polis yang setuju.

Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso mengungkapkan, tren meningkatnya jumlah pemegang polis yang mengikuti program restrukturisasi polis juga diikuti oleh sebanyak 110.829 pemegang polis ritel. "Jadi dua bulan pelaksanaan program restrukturisasi sejak diumumkan, total nilai tunai polis ritel yang sudah direstrukturasasi mencapai kurang lebih 80%," jelas dia melalui siaran pers, belum lama ini.

Mahelan menjelaskan, pihaknya telah mengerahkan lebih dari 1.000 karyawan dan agen untuk bisa mendukung kegiatan sosialisasi program restrukturisasi polis Jiwasraya. Pengerahan ribuan karyawan serta agen tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi yang utuh dan lengkap mengenai tujuan dari program restrukturisasi.

Dengan begitu, sambung dia, nasabah memahami betul peran dan keberadaan perusahaan baru

bernama IFG Life yang nantinya akan melanjutkan pemberian manfaat asuransi kepada pemegang polis eks Jiwasraya. Karena itu, Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya memiliki harapan besar agar seluruh pemegang polis dapat mengikuti program restrukturisasi demi menghindari kerugian akibat kondisi Jiwasraya yang sudah tidak mampu memenuhi kewajiban.

Dia mengungkapkan, pelaksanaan program restrukturisasi polis Jiwasraya sendiri merupakan hasil dari pembahasan yang panjang di antara pemegang saham, otoritas, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga lembaga pengawas. Restrukturisasi menjadi solusi untuk para nasabah dan Jiwasraya sendiri.

"Tugas kami dimulai dari mempertahankan Jiwasraya dengan kondisi keuangan yang sudah tidak memungkinkan, hingga mencari solusi dengan menyiapkan opsi-opsi penyelamatan melalui skema restrukturisasi yang telah disepakati bersama," jelas Mahelan.

Dia menjelaskan, pihaknya telah melibatkan lembaga pengawas dan pihak ketiga untuk melakukan audit terhadap polis serta portofolio yang *clear and clean*. Hal itu erat kaitannya guna memastikan proses migrasi portofolio ke IFG Life sesuai aturan.

Tuntas Mei 2021

Jika tak ada halangan, Tim Percepatan Restrukturisasi Polis Jiwasraya optimistis proses migrasi polis dari Jiwasraya ke IFG Life bisa dilakukan pada Mei 2021, atau bertepatan dengan batas akhir dari waktu yang ditargetkan Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya terkait pelaksanaan program restrukturisasi.

"Kami menyadari dan memohon maaf jika pelaksanaan program restrukturisasi ini belum bisa memuaskan semua pihak. Namun langkah ini kami jalankan karena program restrukturisasi ini telah diputuskan bersama dan merupakan solusi terbaik demi menghindari kerugian yang lebih besar kedepannya," ucap Mahelan.

Program restrukturisasi polis merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pemegang saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Inisiatif itu dalam rangka menyelesaikan sengketa masalah yang terjadi di Jiwasraya dalam satu dekade terakhir.

Untuk menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya dan melakukan migrasi ke IFG Life, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 22 triliun yang bersumber dari penyerahan modal negara (PMN). Selain itu dana sebesar Rp 4,7 triliun turut diupayakan dari *fund raising* IFG selaku induk usaha IFG Life. (pri)

4. **BRI Life Tawarkan Produk Asuransi untuk Nelayan**
Kontan, hal. 10 / 07-04-2021

BRI Life Tawarkan Produk Asuransi untuk Nelayan



ANTARA/Irwansyah Putra

Penting bagi nelayan dan keluarga, memiliki asuransi jiwa khusus.

JAKARTA. Nelayan adalah salah satu faktor kunci pertumbuhan industri kelautan dan perikanan. Sayangnya, kondisi perekonomian nelayan Indonesia yang belum sejahtera. Selain itu, tingkat resiko pekerjaan yang tinggi, profesi nelayan pun membutuhkan proteksi khusus. Penting bagi nelayan dan keluarga, memiliki asuransi jiwa khusus

BRI Life memiliki pasar mikro yang besar dan luas, termasuk pangsa pasar komunitas nelayan. BRI Life menawarkan perlindungan asuransi mikro, AM Prisma Plus. Menggandeng Aruna dan Qoala, BRI Life mensosialisasikan produk asuransi mikro AM Prisma Plus ke daerah pesisir bagi nelayan dan keluarganya. Produk ini menawarkan premi terjangkau dan pengurusan yang mudah.

"Kami optimistis, kerjasama ini akan berjalan dengan sangat baik dan prospektif. Di samping akan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat mikro, dalam hal ini nelayan", ujar Direktur Pemasaran dan Bisnis Syariah BRI Life, Anik Hidayati dalam siaran pers, Selasa (6/4).

Lokasi pertama yang menjadi percobaan untuk penetrasi asuransi mikro AM Prisma Plus ini adalah wilayah Masalembu. Wilayah ini secara geografis terletak di antara Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Flores dan Selat Lombok.

Selvi Mayasari

Kasus Jiwasraya Berdampak ke Investor

PENEGAKAN hukum kasus PT Asuransi Jiwasraya (AJS) membawa dampak tidak ringan bagi investor di pasar modal.

Investor menjadi khawatir untuk membeli saham, utamanya saham BUMN, karena takut terseret kasus hukum bila ternyata pembelian itu dianggap bermasalah.

"Saya sangat khawatir proses penegakan hukum telah membuat para investor takut untuk berinvestasi, utamanya pada perusahaan BUMN. Pun akan muncul stigma bahwa apabila membeli saham perusahaan BUMN dapat terseret kasus korupsi karena dianggap telah merugikan negara," tulis Piter

Rasiman dalam nota keberatan pribadinya.

Piter Rasiman menjadi terdakwa dalam kasus Jiwasraya. Piter diduga berperan sebagai pihak yang mengatur dan mengendalikan lawan transaksi (*counterparty*) dalam pengelolaan instrumen investasi saham dan reksa dana dari AJS.

Dalam nota keberatannya, Piter menyebutkan bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukannya selalu dalam koridor hukum sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan pasar modal.

"Terbukti hingga saat ini saya sama sekali tidak pernah mene-

rima sanksi dari Bursa Efek Indonesia (BEI), OJK, ataupun lembaga lainnya yang terkait. Jika ada kesalahan dalam melakukan transaksi yang saya lakukan, tentunya menjadi ranah permasalahan hukum pasar modal, sebagaimana dalil jaksa penuntut umum yang lebih banyak menguraikan peraturan di bidang pasar modal," kata dia.

Ia menjelaskan, terdapat 117 emiten dalam portofolio PT AJS yang disebutkan dibeli Piter dalam surat dakwaan penuntut umum. Namun, itu tidak diuraikan sama sekali saham mana yang dibeli atau nomine darinya.

Disebutkan pula dalam

dakwaan JPU bahwa PT AJS mengalami kerugian sebesar Rp16 triliun lebih. Sampai saat ini PT AJS masih memiliki saham-saham tersebut. Apabila ada penurunan nilai, tentu masih bersifat *unrealized* atau *potential loss*.

Kini banyak ahli pasar modal sampai BEI mengatakan melalui berbagai media massa bahwa *unrealized loss* bukanlah kerugian. Kerugian baru akan terjadi apabila saham tersebut sudah dijual dengan nilai lebih rendah daripada perolehannya.

"PT AJS belum mengalami kerugian karena saham-saham itu masih dimiliki," tandasnya. (E-1)

6. **Masa Restrukturisasi Polis Tinggal 2 Bulan, Izin Operasional IFG Life Belum Terbit**
[Bisnis.com](#) / 06-04-2021

Masa Restrukturisasi Polis Tinggal 2 Bulan, Izin Operasional IFG Life Belum Terbit

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hendrawan Supratikno menjelaskan bahwa proses restrukturisasi polis Jiwasraya masih menjadi pembahasan di komisinya. Salah satu sorotan DPR adalah jalannya proses restrukturisasi tersebut.



Wibi Pangestu Pratama - [Bisnis.com](#)
06 April 2021 | 19:28 WIB



Indonesia Financial Group

Logo Indonesia Financial Group (IFG)

Bisnis.com, JAKARTA — Izin operasional IFG Life, perusahaan asuransi jiwa tujuan restrukturisasi polis dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero), belum kunjung diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menjelang tenggat waktu target restrukturisasi, proses pengajuan izin dinilai masih menunjukkan perkembangan.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hendrawan Supratikno menjelaskan bahwa proses restrukturisasi polis Jiwasraya masih menjadi pembahasan di komisinya. Salah satu sorotan DPR adalah jalannya proses restrukturisasi tersebut.

Selain itu, menurut Hendrawan, pihaknya pun menyoroti langkah setelah penawaran dan persetujuan restrukturisasi, yakni migrasi ke IFG Life. Proses tersebut belum dapat berlangsung jika izin operasional IFG Life belum terbit.

"Dalam rapat-rapat Komisi XI sudah dibahas terkait izin [IFG Life] itu," ujar Hendrawan kepada *Bisnis*, Selasa (6/4/2021).

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan OJK dalam beberapa rapat. OJK telah menyampaikan bahwa izin operasional IFG Life masih diproses oleh otoritas.

Dia menjabarkan bahwa masih terdapat sejumlah persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dan wawancara yang harus dilakukan. Kedua faktor tersebut dinilai membuat izin operasional IFG Life belum terbit.

"Tapi intinya *progress*-nya bagus," ujar Misbakhun kepada *Bisnis*, Selasa (6/4/2021).

Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya R. Mahelan Prabantariksa menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan proses restrukturisasi polis rampung pada akhir Mei 2021. Artinya, tenggat waktu itu kurang dari dua bulan lagi.

Mahelan menyatakan optimisme bahwa migrasi polis ke IFG Life dapat berlangsung bertepatan dengan tenggat waktu tersebut. Manajemen Jiwasraya pun berharap izin IFG Life dapat terbit.

Adapun, IFG Life telah mengantongi izin pembentukan perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Struktur perusahaan pun telah terbentuk dan persiapan pelaksanaan bisnis dinilai telah berjalan, tetapi bisnis asuransi baru dapat dijalankan setelah terdapat izin operasional.

"IFG Life sudah mendapatkan izin pembentukan perusahaan, dari Kemenkumham," ujar Direktur Bisnis Indonesia Financial Group (IFG) Pantoro Pander Silitunga, yang juga merupakan Komisaris IFG Life kepada *Bisnis*, belum lama ini.

7. **Sambangi PN Jakarta Selatan, Ini Permohonan Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912**
Bisnis.com / 06-04-2021

Sambangi PN Jakarta Selatan, Ini Permohonan Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912

Sekitar sebelas orang yang berasal dari tiga kelompok pemegang polis Bumiputera menyerahkan susunan panitia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya sesuai kesepakatan antara mereka dengan manajemen perusahaan dan disaksikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com

06 April 2021 | 16:11 WIB



Pemegang polis AJB Bumiputera 1912 berfoto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (6/4/2021) usai menyerahkan dokumen terkait panitia pemilihan BPA di perusahaan tersebut. - Dok. Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera menyerahkan dokumen permohonan penetapan susunan panitia pemilihan Badan Perwakilan Anggota periode 2021–2026 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penyerahan dokumen tersebut berlangsung pada Selasa (6/4/2021). Sekitar sebelas orang yang berasal dari tiga kelompok pemegang polis Bumiputera menyerahkan susunan panitia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya sesuai kesepakatan antara mereka dengan manajemen perusahaan dan disaksikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tiga kelompok itu terdiri dari Perkumpulan Pemegang Polis Bumiputera Indonesia yang dipimpin Yayat Supriyatna, Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera yang dipimpin Fien Mangiri, dan Perhimpunan Pemegang Polis Bumiputera (Pempol Bumi) yang dipimpin Jaka Irwanta. Selain itu, Asosiasi Agen Bumiputera Indonesia (AABI) turut serta dalam susunan panitia.

"Atas kesepakatan tersebut, bersama ini kami para Ketua Pemegang Polis AJB Bumiputera mengajukan permohonan penetapan Panitia Pemilihan Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 periode 2021–2026 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," tertulis dalam salinan surat yang diperoleh *Bisnis* pada Selasa (6/4/2021).

Para pemegang polis menilai terdapat enam alasan pengajuan penetapan panitia pemilihan BPA tersebut. *Pertama* yakni Bumiputera merupakan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama (mutual) yang dimiliki para pemegang polis, dengan Anggaran Dasar sebagai dasar hukum dalam jalannya operasional perusahaan.

Kedua, terdapat kesepakatan antara perwakilan pemegang polis, serikat pekerja Bumiputera, serta direksi dan komisaris Bumiputera yang dimediasi oleh OJK. Kesepakatan itu muncul dalam pertemuan pada 16 Maret 2021 di Wisma Mulia 2, Jakarta yang merupakan kantor OJK.

Ketiga, terdapat keputusan direksi perihal pembentukan panitia pemilihan BPA. Keempat, mempertimbangkan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Bumiputera yakni panitia pemilihan itu terdiri dari unsur BPA yang tidak mengikuti pemilihan, direksi dan karyawan Bumiputera, dan unsur independen yang diusulkan direksi.

"Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) [yang berisi] Panitia Pemilihan Anggota BPA disahkan dalam sidang BPA," tertulis dalam poin kelima di surat tersebut.

Lalu, poin keenam yang melandasi permohonan itu adalah kekosongan BPA yang telah berakhir pada 26 Desember 2020 sesuai surat OJK nomor S-34/D.05/2020. Hingga saat ini, belum terdapat pembentukan panitia pemilihan BPA yang dijalankan manajemen Bumiputera. Surat tersebut melampirkan dokumen kesepakatan dari pertemuan di OJK. Selain itu, terdapat sejumlah dokumen lainnya yang dinilai dapat menggambarkan kondisi Bumiputera dalam hal kekosongan anggota BPA.

"Permohonan disertai lampiran keputusan bersama pembentukan panitia pemilihan BPA di OJK, [surat nomor] S-14 undangan OJK, Anggaran Dasar Bumiputera, dan susunan panitia yang sudah disetujui direksi," ujar Jaka kepada *Bisnis*, Selasa (6/4/2021) usai menyerahkan dokumen tersebut.

8. **Jiwasraya Publikasikan Laporan Keuangan 2020, Peroleh Opini Wajar**
[Bisnis.com](#) / 06-04-2021

Jiwasraya Publikasikan Laporan Keuangan 2020, Peroleh Opini Wajar

Dalam laporan keuangan 2020 tidak terdapat catatan nilai premi dan klaim dari Jiwasraya. Namun, laporan itu mencantumkan data 2019 dengan nilai perolehan premi Rp3,08 triliun dan pembayaran klaim Rp14,8 triliun.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
06 April 2021 | 18:59 WIB



Pekerja membersihkan logo milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta, Rabu (31/7). *Bisnis - Abdullah Azzam*

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menerbitkan laporan keuangan 2020 dan memperoleh opini wajar. Dalam laporan keuangan tersebut, tidak terdapat catatan perolehan premi dan pembayaran klaim.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh *Bisnis*, laporan keuangan Jiwasraya itu ditetapkan oleh direksi pada 31 Maret 2021. Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono menyematkan opini wajar terhadap laporan keuangan 2020 itu.

Dalam laporan keuangan 2020 tidak terdapat catatan nilai premi dan klaim dari Jiwasraya. Namun, laporan itu mencantumkan data 2019 dengan nilai perolehan premi Rp3,08 triliun dan pembayaran klaim Rp14,8 triliun.

Adapun, Jiwasraya mencatatkan adanya pendapatan lain senilai Rp1,89 triliun. Akun tersebut menyumbang jumlah pendapatan yang mencapai Rp1,9 triliun atau turun 9,8 persen (*year-on-year*) dari sebelumnya Rp2,1 triliun.

Dalam laporan keuangan itu tercantum bahwa akun pendapatan lain mencakup pendapatan dari operasi yang dihentikan, juga beban usaha lainnya senilai Rp5,58 triliun yang memuat biaya dari operasi yang dihentikan. Akun tersebut muncul sebagai implementasi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 58.

"Laporan keuangan ini disajikan dengan menggunakan PSAK 58, sehubungan dengan rencana pengalihan bisnis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke perusahaan baru yang merupakan anak PT BPUI (Persero)," tertulis dalam laporan keuangan tersebut yang dikutip *Bisnis* pada Selasa (5/4/2021).

Total aset Jiwasraya tercatat senilai Rp15,7 triliun atau turun 13,3 persen (yoy) dibandingkan dengan sebelumnya senilai Rp18,1 triliun. Penurunan itu dipengaruhi oleh berkurangnya nilai investasi perseroan.

Jiwasraya mencatat bahwa nilai investasi pada 2020 senilai Rp2,1 triliun, berkurang hingga 85,6 persen (yoy) dari sebelumnya Rp14,9 triliun. Instrumen investasi yang tersisa pun hanya deposito berjangka senilai Rp547,8 miliar serta bangunan dan tanah untuk investasi senilai Rp1,6 triliun.

Padahal, pada 2019, Jiwasraya masih mencantumkan investasi di instrumen lainnya, seperti saham senilai Rp1,65 triliun, reksa dana Rp1,65 triliun, obligasi Rp692,8 miliar, medium term notes (MTN) Rp473,9 miliar, surat berharga negara (SBN) Rp3,15 triliun, efek beragun aset Rp12,1 miliar, penyertaan langsung Rp777,8 miliar, dan pinjaman polis Rp89,02 miliar.

Direktur Keuangan Jiwasraya Farid Azhar Nasution menjelaskan bahwa tidak tercantumnya nilai premi, klaim, dan sejumlah instrumen investasi merupakan bentuk implementasi PSAK 58 dalam penyampaian laporan keuangan 2020.

"Ini terkait penerapan PSAK 58," ujar Farid kepada *Bisnis*, Selasa (5/4/2021).

Meskipun nilai investasinya menurun, hasil investasi Jiwasraya pada 2020 justru mencatatkan kinerja positif. Tahun lalu Jiwasraya membukukan hasil investasi Rp33,5 miliar, berbalik untung dari 2019 yang merugi Rp896,1 miliar.

Berbagai capaian kinerja itu membuat Jiwasraya mencatatkan kerugian Rp4,04 triliun pada 2020. Nilai kerugiannya berkurang 2,27 persen (yoy) dari 2019 yang merugi Rp4,14 triliun.

"Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono yang laporannya tertanggal 10 Maret 2021 dengan pendapat Wajar," tertulis dalam laporan keuangan tersebut.

9. **OJK Perlu Prioritaskan Izin Operasional IFG Life demi Restrukturisasi Polis Jiwasraya**
[Bisnis.com](#) / 06-04-2021

OJK Perlu Prioritaskan Izin Operasional IFG Life demi Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Restrukturisasi polis tersebut belum dapat berjalan jika OJK belum menerbitkan izin operasional IFG Life, perusahaan yang menjadi tujuan restrukturisasi polis.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com

06 April 2021 | 21:00 WIB



Logo Indonesia Financial Group (IFG)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai perlu memprioritaskan proses pengajuan izin operasional IFG Life karena sejumlah alasan, mulai dari statusnya yang merupakan anak pelat merah hingga adanya risiko gugatan dari para nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai bahwa Jiwasraya merupakan perusahaan *high profile* karena statusnya yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sempat memimpin pasar industri asuransi jiwa. Hal tersebut dapat mendasari pentingnya memprioritaskan penyelamatan Jiwasraya, termasuk melalui restrukturisasi polis.

Restrukturisasi polis tersebut belum dapat berjalan jika OJK belum menerbitkan izin operasional IFG Life, perusahaan yang menjadi tujuan restrukturisasi polis. Oleh karena itu, menurut Irvan, otoritas perlu memprioritaskan proses perizinan IFG Life.

"Jiwasraya ini BUMN yang tentu bisa mendapatkan *privilege* dalam hal perizinan, kaitannya dengan IFG Life. Kalau dibandingkan dengan izin operasional untuk perusahaan asing yang mengakuisisi bisa cepat, IFG Life pun harusnya bisa cepat, banyak ditunggu masyarakat," ujar Irvan kepada *Bisnis*, Selasa (6/4/2021).

Menurutnya, OJK perlu mempertimbangkan berbagai perlawanan hukum terhadap Jiwasraya. Seperti diketahui, sejumlah nasabah, baik individu maupun kelompok, mengajukan gugatan bagi perseroan dan mekanisme restrukturisasi polis.

Bahkan, Irvan pun menyatakan terdapat kelompok nasabah mantan karyawan perusahaan BUMN yang mengajukan gugatan. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan diprioritaskannya proses izin IFG Life sehingga restrukturisasi polis dapat segera berjalan.

"Saya melihat OJK seperti gamang dengan kondisi yang ada, seharusnya OJK bisa menggunakan otoritasnya dengan maksimal. Izin ini akan menghambat, dengan di satu sisi proses restrukturisasi itu sendiri menghadapi berbagai kesulitan," ujar Irvan.

Manajemen Jiwasraya menargetkan proses restrukturisasi polis rampung pada akhir Mei 2021. Artinya, tenggat waktu itu kurang dari dua bulan lagi, sehingga IFG harus terlebih dahulu beroperasi agar transfer portofolio dapat dilakukan.

Adapun, IFG Life telah mengantongi izin pembentukan perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Struktur perusahaan pun telah terbentuk dan persiapan pelaksanaan bisnis dinilai telah berjalan, tetapi bisnis asuransi baru dapat dijalankan setelah terdapat izin operasional.

10. Kronologi Asuransi AIA Digugat Nasabah [Cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) / 06-04-2021

Kronologi Asuransi AIA Digugat Nasabah

CNN Indonesia | Selasa, 06/04/2021 12:59 WIB

Bagikan :  



PT AIA Financial menjelaskan kronologi gugatan yang dilaungkan oleh nasabah bernama Sutomo. (Dok. aia-financial.co.id).

Jakarta, CNN Indonesia -- PT **AIA Financial**, perusahaan **asuransi jiwa**, menjelaskan kronologi gugatan yang dilaungkan oleh nasabah bernama Sutomo. Chief Marketing Officer AIA Financial Lim Chet Ming mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap polis Sutomo.

Dari sana, ditemukan bahwa semua syarat dan ketentuan polis Maxi Personal Health atau produk asuransi dengan unsur proteksi dan investasi yang dimiliki Sutomo telah diinformasikan dan disetujui yang bersangkutan sebelum polis ditandatangani.

"Pada ilustrasi yang ditandatangani oleh beliau (Sutomo), tercantum keterangan terperinci mengenai biaya-biaya, termasuk biaya akuisisi dan nilai investasi yang tidak dijamin karena mengikuti kondisi pasar modal," imbuhnya lewat rilis, Selasa (6/4).

Lebih lanjut Lim menyebut setelah penandatanganan polis, AIA telah mengklarifikasi dan mengkonfirmasi melalui *welcome call* yang terekam kepada Sutomo.

Welcome call mencakup penjelasan rincian dan manfaat produk, memastikan pemegang polis memahami dan menyetujui ketentuan polis, termasuk nilai dan masa bayar premi, termasuk fluktuasi nilai dana investasi berdasarkan pasar modal.

Kemudian, meminta pemegang polis untuk membaca buku polis secara seksama. Lim mengatakan perusahaan juga memberikan waktu untuk mempelajari produk asuransi yang dibeli dan nasabah dapat membatalkan polis selama periode yang ditentukan.

Selama periode itu, AIA menyebut Sutomo tidak mengajukan pembatalan polis yang dibelinya. "Penjelasan dalam dalam welcome call diterima oleh Bapak Sutomo selaku pemegang polis dan tidak mengajukan keberatan atau sanggahan apapun," kata dia.

Lebih jauh, Lim mengklaim sejak polis diterbitkan pada 2015, AIA telah mengirimkan laporan transaksi dan laporan tahunan kepada Sutomo, yang di dalamnya terdapat informasi mengenai biaya akuisisi, biaya bulanan dan estimasi nilai penebusan polis setelah dikurangi biaya penebusan polis, berdasarkan nilai unit saat laporan tercetak.

"AIA menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dan penyelesaian keluhan Bapak Sutomo telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk menghubungi dan mengunjungi beliau secara langsung," tambahnya.

Lim mengatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang diambil oleh Sutomo. Ia menegaskan AIA akan mematuhi hukum yang berlaku, serta menghimbau semua pihak untuk melakukan hal yang sama.

Seperti yang diketahui, Sutomo mengugat AIA dan gugatannya tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sutomo mengaku mengalami kerugian materiil sebesar Rp534 juta dan kerugian immateriil senilai Rp2 miliar.

Sutomo mengaku tidak pernah menerima, membaca, serta menandatangani polis asuransi AIA Financial, sementara terjadi penarikan/debit uang dari rekeningnya.

11. Asuransi AIA Buka Suara Soal Gugatan Nasabah Rp534 Juta [Cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com) / 06-04-2021

Asuransi AIA Buka Suara Soal Gugatan Nasabah Rp534 Juta

CNN Indonesia | Selasa, 06/04/2021 09:47 WIB

Bagikan :  



AIA Financial mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap polis asuransi Sutomo, nasabah yang mengajukan gugatan atas kerugian Rp534 juta. Ilustrasi. (Dok AIA).

Jakarta, CNN Indonesia -- PT **AIA Financial**, perusahaan **asuransi jiwa**, buka suara soal gugatan yang dilaungkan oleh nasabah bernama Sutomo. Dalam gugatannya, yang tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sutomo mengaku mengalami kerugian materi sebesar Rp534 juta dan kerugian immateril senilai Rp2 miliar.

Sutomo mengaku tidak pernah menerima, membaca, serta menandatangani polis asuransi AIA Financial, sementara terjadi penarikan/debit uang dari rekeningnya.

Menanggapi itu, Chief Marketing Officer AIA Financial Lim Chet Ming mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap polis Sutomo.

Dari sana, ditemukan bahwa semua syarat dan ketentuan polis Maxi Personal Health atau produk asuransi dengan unsur proteksi dan investasi yang dimiliki Sutomo telah diinformasikan dan disetujui yang bersangkutan sebelum polis ditandatangani.

"Pada ilustrasi yang ditandatangani oleh beliau (Sutomo), tercantum keterangan terperinci mengenai biaya-biaya, termasuk biaya akuisisi dan nilai investasi yang tidak dijamin karena mengikuti kondisi pasar modal," imbuhnya lewat rilis, dikutip beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut Lim menyebut setelah penandatanganan polis, AIA telah mengklarifikasi dan mengkonfirmasi melalui welcome call yang terekam kepada Sutomo.

Welcome call mencakup penjelasan rincian dan manfaat produk, memastikan pemegang polis memahami dan menyetujui ketentuan polis, termasuk nilai dan masa bayar premi, termasuk fluktuasi nilai dana investasi berdasarkan pasar modal.

Kemudian, meminta pemegang polis untuk membaca buku polis secara seksama. Lim mengatakan perusahaan juga memberikan waktu untuk mempelajari produk asuransi yang dibeli dan nasabah dapat membatalkan polis selama periode yang ditentukan.

Selama periode itu, AIA menyebut Sutomo tidak mengajukan pembatalan polis yang dibelinya. "Penjelasan dalam welcome call diterima oleh Bapak Sutomo selaku pemegang polis dan tidak mengajukan keberatan atau sanggahan apapun," kata dia.

Lebih jauh, Lim mengklaim sejak polis diterbitkan pada 2015, AIA telah mengirimkan laporan transaksi dan laporan tahunan kepada Sutomo, yang di dalamnya terdapat informasi mengenai biaya akuisisi, biaya bulanan dan estimasi nilai penebusan polis setelah dikurangi biaya penebusan polis, berdasarkan nilai unit saat laporan tercetak.

"AIA menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dan penyelesaian keluhan Bapak Sutomo telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk menghubungi dan mengunjungi beliau secara langsung," tambahnya.

Lim mengatakan pihaknya menghormati langkah hukum yang diambil oleh Sutomo. Ia menegaskan AIA akan mematuhi hukum yang berlaku, serta menghimbau semua pihak untuk melakukan hal yang sama.

12. MA Diminta Kabulkan Kasasi Kejaksaan Terkait Kasus Jiwasraya Jawapos.com / 06-04-2021

MA Diminta Kabulkan Kasasi Kejaksaan Terkait Kasus Jiwasraya

KASUISTIKA 6 April 2021, 11:36:17 WIB



Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Mahkamah Agung (MA) diminta untuk mengabulkan upaya hukum kasasi yang dilayangkan jaksa pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai vonis terdakwa kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menyampaikan, mendukung langkah Kejagung mengajukan upaya kasasi untuk terdakwa korupsi Jiwasraya. Sebab telah merugikan keuangan negara senilai Rp 16,8 triliun.

"Harusnya MA mengabulkan permohonan Jaksa didasarkan pada surat edaran MA itu sendiri terkait kesetaraan vonis (seumur hidup) pada kasus yang sama," kata Uchok Sky Khadafi saat dikonfirmasi, Selasa (6/4).

Uchok mengharapkan, Korps Adhyaksa terus mengejar aset dari para terdakwa Jiwasraya. Hal ini sebagai upata untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 16,8 triliun.

"Ini sangat penting, apalagi korban dari kasus ini ada jutaan nasabah. Jutaan korban ini juga perlu jadi pertimbangan MA untuk mengabulkan permohonan kasasi Jaksa," tegas Uchok.

Sebelumnya, Kejagung resmi mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis banding yang dijatuhkan kepada enam terdakwa kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya. Upaya hukum ini ditempuh, karena vonis banding yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih rendah dari putusan tingkat pertama.

"Sudah kasih petunjuk Dirtut untuk kasasi," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejagung, Ali Mukartono dikonfirmasi, Senin (15/3).

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan hukuman banding terhadap enam terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya.

Keenam terdakwa itu adalah mantan Direktur Utama (Dirut) Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan; Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirta; Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman lebih ringan dari vonis pengadilan tingkat pertama terhadap empat terdakwa. Dari vonis seumur hidup, Hendrisman, Syahmirwan dan Joko Tjandra dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.

Sementara itu, Hary Prasetyo dikurangi hukumannya menjadi 20 tahun dari seumur hidup. Sedangkan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat tetap divonis seumur hidup.

Meski dikurangi hukumannya, keenam terdakwa Jiwasraya tetap divonis terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 16.807.283.375.000,00 triliun. Ali menyampaikan, alasan pihaknya mengajukan kasasi karena Hakim PT Jakarta menjatuhkan denda tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

"Karena ada denda yang nggak dijatuhkan, misalnya itu di Undang-Undang korupsi itu kan pidana badan sama denda kan pakai frasa dan, jadi harus dua-duanya dijatuhkan," pungkask Ali.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan



kejaksaan agung ma kasus korupsi jiwasraya

Gandeng Aruna dan Qoala, BRI Life Siapkan Asuransi Jiwa untuk Nelayan

Selasa, 6 April 2021 17:09 WIB



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BRI Life turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup para nelayan melalui produk perlindungan asuransi mikro, AM Prisma Plus.

Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk penetrasi kepada nelayan melalui kerja sama sinergis dengan Aruna dan Qoala, untuk mensosialisasikan produk asuransi mikro AM Prisma Plus yang dimiliki BRI Life ke daerah pesisir bagi nelayan dan keluarganya, dengan premi terjangkau dan pengurusan yang mudah.

"Sinergi antara BRI Life, Aruna dan Qoala melalui penandatanganan MOU yang dilakukan pada Kamis (1/4/2021) lalu, merupakan momentum penting bagi BRI Life. Kami optimis, kerjasama ini akan berjalan dengan sangat baik dan prospektif, di samping akan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat mikro, dalam hal ini nelayan," ujar Direktur Pemasaran dan Bisnis Syariah BRI Life Anik Hidayati, Selasa (6/4/2021).

Lokasi pertama yang menjadi percobaan untuk penetrasi asuransi mikro AM Prisma Plus ini adalah Wilayah Masalembu yang secara geografis terletak di antara Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Flores, dan Selat Lombok.

Pertemuan tiga kawasan perairan ini menciptakan kekuatan fisis interaksi laut dan atmosfer secara alami, dengan risiko kecelakaan yang tinggi.

Namun, perairan ini juga memiliki potensi ikan yang berlimpah dan beragam, tak heran jika mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan meskipun risiko melaut sangat tinggi. Selain itu, asuransi mikro AM Prisma Plus ini juga akan diperkenalkan di Ujung Genteng, Jenebora dan Papaan.

"Bagi Aruna, nelayan merupakan mitra strategis yang perlu diperhatikan juga kesejahteraannya apalagi melaut merupakan pekerjaan dengan risiko tinggi. Untuk itu kami mengajukan kerja sama dengan Qoala sebagai platform asuransi digital untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil. Nantinya, para nelayan yang telah terdaftar di platform Aruna cukup memberikan fotokopi KTP dan KK kepada para Local Heroes di Aruna Site dan tim kami ini yang menginput datanya ke platform Qoala" ungkap Utari Octavianty selaku co-founder dan General Director dari Aruna.

Sementara itu Co-founder sekaligus Chief Operating Officer (COO) Qoala, Tommy Martin, menjelaskan aplikasi Qoala sangat mudah digunakan dan bisa diakses dengan cepat melalui smartphone. Untuk urusan keamanan data, tak perlu diragukan, Qoala saat ini tercatat dalam Sandbox OJK di klaster Insurtech.

"Kami memiliki komitmen penuh untuk memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna Qoala, khususnya para nelayan. Asuransi seharusnya bisa melindungi para pekerja di garis terdepan, dan harus bisa diakses dengan cepat dan mudah. Kerja sama Qoala dan Aruna ini kami harap dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan," ujar Tommy.

"AM Prisma Plus, merupakan asuransi mikro yang pembayaran preminya hanya sekali pada awal kepesertaan, yakni Rp 50 ribu untuk perorangan atau dapat juga dibeli paket bersama pasangan seharga Rp 90 ribu, dan selanjutnya tidak dikenakan lagi selama satu tahun masa berlaku kepesertaan" tegas Anik.

Produk asuransi dari BRI Life ini memberikan santunan kematian akibat kecelakaan hingga Rp 19.500.000.

Melalui asuransi ini, nelayan juga dapat melakukan klaim sebesar Rp 5 juta untuk santunan cacat fisik akibat kecelakaan, beserta tambahan biaya operasi, santunan rawat inap, dan kematian wajar.

"Pemilihan Aruna dan Qoala, sebagai partner kerjasama BRI Life untuk edukasi dan sosialisasi asuransi bagi masyarakat nelayan sangat tepat. Aruna yang merupakan platform integrasi pasar hasil laut terbesar di Indonesia adalah juga salah satu perusahaan yang concern terhadap kesejahteraan nelayan dengan data base yang cukup representatif, sementara aplikasi Qoala, akan sangat membantu penetrasi AM Prisma Plus ke lokasi-lokasi terpencil," tutup Anik.

Tags [BRI Life](#) [Qoala](#) [startup perikanan Aruna](#) [nelayan](#)

14. Alasan Kejagung Kasasi Korupsi Jiwasraya

[Validnews.com](https://www.validnews.com) / 06-04-2021

Alasan Kejagung Kasasi Korupsi Jiwasraya

Incar penyitaan perusahaan milik terdakwa. Pengadilan hanya putusan sita aset terdakwa
06 April 2021, 14:37



Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya Heru Hidayat (kedua kanan) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Heru Hidayat bersama Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokro dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono menjalani sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yaitu trader saham Jimmy Sutopo, mantan sekretaris Heru Hidayat, Marine Imelda dan Cyndi Violeta. ANTARA FOTO/Aprilio Akbar

JAKARTA – Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Ali Mukartono membeberkan alasan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) akan putusan tingkat banding pengadilan tinggi tindak pidana korupsi (tipikor) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta enam terdakwa korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ali menyebutkan, penuntut umum bersikukuh agar dua perusahaan milik Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral, Heru Hidayat (HH) dirampas oleh negara. Sementara, putusan banding hanya meluluskan penyitaan aset dua perusahaan itu.

"Dua perusahaan milik HH agar disita oleh negara," kata Ali, di Kejaksaan Agung, Selasa (6/4).

Kedua perusahaan milik Heru Hidayat itu berupa tambang batu bara dan penangkaran ikan.

Ali sampaikan, merampas aset dengan merampas perusahaan adalah dua hal berbeda. "Kalau merampas aset, tidak ikut perusahaannya, kalau merampas perusahaan, berikut asetnya ya," tambah Ali.

Menurut Ali, tuntutan jaksa untuk merampas perusahaan diakomodir dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Pada Pasal 18 ayat 1 huruf a disebutkan pidana tambahan dari kejahatan korupsi juga bisa berupa perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk perusahaan milik terpidana.

Ali menyebutkan pihaknya sudah menaksir nilai aset di dalam perusahaan tersebut. Menurutnya, tuntutan untuk merampas tetap dilakukan meskipun kedua perusahaan berisiko memiliki utang.

"Oh itu tetap jalan. Keterikatan dengan pihak ketika kontrak-kontrak tetap jalan. Kita harus hormati itu," tambah Ali.

Dalam putusan banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas vonis seumur hidup terhadap empat terdakwa. Dua diantaranya, yakni Syahmirwan dan Joko Hartono Tirta, dikurangi masa hukumannya menjadi 18 tahun.

Sementara, mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo hukuman mereka berkurang menjadi 20 tahun.

Untuk vonis Heru dan Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro, tetap dihukum penjara seumur hidup.

Penyidikan Asabri

Penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung mendalami peran Rommy Dharma Satriawan, dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Asabri (Persero).

Direktur PT Bukit Berlian Plantations itu diperiksa sebagai saksi pada Senin (5/4). Dia diperiksa bersama tujuh saksi lainnya untuk tersangka Heru Hidayat.

Rommy adalah anak dari pengusaha Artalyta Suryani alias Ayin.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah mengatakan, penyidik tengah mendalami aset terkait tersangka Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, di Gorontalo.

"Jadi, pemeriksaan itu terkait aset Heru yang di Gorontalo. Kami masih melakukan pengecekan," kata Febrie, kepada wartawan, Selasa (6/4).

Febrie tak menyebutkan bentuk aset yang tengah diincar penyidik dari Rommy. Sebab, hingga saat ini, aset tersebut belum berstatus sita oleh Kejaksaan Agung.

Berdasarkan informasi laman resmi milik Bukit Berlian Plantation, perusahaan ini telah berdiri sejak 2011. Perusahaan ini bergerak di bidang minyak kelapa sawit. Perusahaan tersebut mengelola 70 ribu hektare lahan kelapa sawit yang terbentang di Palu, Gorontalo, Manado, dan Maluku Utara.

"Kita pastikanlah (akan disita **red**) bagaimana mengenai proses perolehannya, adakah keterkaitan dana masuk dengan Heru," lanjut Febrie.

Artalyta sendiri pernah terlibat dalam kasus penyuapan jaksa Urip Tri Gunawan dalam perkara BLBI pada 2008. Ada sejumlah uang yang diserahkan Artalyta kepada Urip dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Penyelidikan kasus BLBI Sjamsul Nursalim, senilai USD660 ribu.

Suap itu diberikan di rumah Sjamsul Nursalim. Atas perbuatannya, Artalyta ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, dia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada 2008.

Selain aset milik Heru, penyidik juga tengah memroses penyitaan sejumlah tanah milik tersangka Benny Tjokrosaputro. Diduga, aset itu dikerjasamakan oleh terdakwa kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan KSO Duta Duta Regency Karunia Metropolitan Kuningan Properti. Karena itu, penyidik memeriksa Tan Kian pada, Senin (5/4).

"Itu atas nama perusahaan lah ya. Tapi kita pastikan bahwa ada kaitannya dengan Asabri. Sekarang sudah diblokir penyidik, masih menunggu status sita," kata Febrie. (**James Manullang**)

15. Digitalisasi Bantu Penetrasi Asuransi di Indonesia

[Beritasatu.com](https://beritasatu.com) / 06-04-2021

Digitalisasi Bantu Penetrasi Asuransi di Indonesia

Selasa, 6 April 2021 | 08:20 WIB
Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA



Ilustrasi privasi data Allianz. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan signifikan dan pesat menuju digitalisasi. Hal ini dapat dilihat dari perubahan pada kebiasaan orang sehari-hari, mulai dari pertemuan yang dilakukan secara daring serta pembayaran non-tunai. Tercatat, saat ini Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar dan tercepat di dunia, dengan total transaksi daring yang diprediksi mencapai US\$ 10 miliar selama 2020.

Kemudahan digital tersebut dimanfaatkan oleh beragam jenis bisnis dan industri, dan salah satunya adalah asuransi yang dapat memangkas proses-proses rumit dan mempercepat layanan. Digitalisasi pada industri asuransi juga diharapkan dapat membantu penetrasi asuransi di Indonesia, yang masih menjadi salah satu negara dengan tingkat penetrasi asuransi terendah di dunia.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal (JKPM) Arif Baharudin mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang diindikasikan sebagai faktor penghambat perkembangan sektor asuransi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah masih rendahnya literasi keuangan dan ketimpangan akses pada jasa keuangan. Sehingga, digitalisasi asuransi memiliki peran penting untuk lebih meningkatkan akses masyarakat pada sektor ini guna terus mendorong pertumbuhannya.

Survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan pada Kuartal II-2020, jumlah pengguna internet di Tanah Air mencapai 196,7 juta atau 73,7% dari total populasi. Fakta tersebut semakin menguatkan pendapat bahwa digitalisasi asuransi dapat menjadi inovasi menarik pada sektor ini.

Beberapa jenis produk asuransi yang sudah marak ditawarkan secara digital, antara lain asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi perjalanan. Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan berbagai produk asuransi berbasis digital ini melalui bermacam platform, seperti *marketplace* C2C (*customer-to-customer*), B2C (*business-to-customer*), platform milik perusahaan asuransi ataupun platform digital lainnya yang dapat diakses menggunakan aplikasi *mobile* ataupun *website*.

Riset Swiss Re Institute mengungkapkan, 76% masyarakat Indonesia tertarik membeli produk asuransi digital. Adapun, platform yang paling banyak dipilih untuk mendapatkan produk asuransi ini adalah e-commerce dan fintech.

"Masyarakat Indonesia memang sudah mengarah ke transformasi digital dan dengan adanya pandemi Covid-19 justru semakin mengakselerasi pertumbuhannya. Namun, meskipun pertumbuhan digital di Indonesia semakin melesat, berdasarkan yang saya analisa masih banyak orang yang terjun ke bisnis digital tanpa betul-betul memahami konsep digital itu sendiri, sehingga tidak sedikit pula yang terjatuh perang harga lewat digital," ujar *Founder* dan CEO Tribelio Denny Santoso dalam siaran pers, Senin (5/4).

Tips Aman Dari Pencurian Data

Namun, kemudahan digital juga mengundang kekhawatiran akan keamanan, terutama dalam hal privasi data. Pada pertengahan 2020, 91 juta data pengguna terpantau diperjualbelikan melalui *Dark Web* seharga Rp 73,5 juta di mana informasi seperti nama, alamat dan kontak dapat dibaca dengan sangat mudah. Hal ini tentu dapat menjadi ancaman bagi pengguna, terutama untuk aktivitas *online* yang vital seperti bertransaksi, termasuk membeli asuransi jika tidak didukung oleh peraturan dan sistem yang menunjung.

Sebuah survei yang dilakukan oleh perusahaan keamanan siber, Kaspersky, pada pertengahan 2020 mengungkapkan bahwa 40% konsumen dari Asia Pasifik menghadapi insiden kebocoran data pribadi yang diaks oleh orang lain tanpa persetujuan. Hal ini semakin didukung oleh data dari Badan Siber dan Sandi Negara yang juga mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2020, terdapat hampir 190 juta upaya serangan siber di Indonesia. Ini meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Allianz Indonesia sendiri telah mengedepankan digitalisasi sejak fase awal nasabah bergabung, hingga melakukan klaim untuk menghadirkan pengalaman pengguna yang memberikan kemudahan serta pelayanan yang berkesan. Salah satunya diwujudkan melalui layanan Allianz *Eazy Connect* yang memudahkan nasabah untuk terkoneksi dengan layanan digital Allianz.

Oleh karena itu, perlindungan data pribadi pengguna menjadi salah satu perhatian utama bagi Allianz Indonesia. PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia telah meraih Sertifikat ISO 27001:2013 yang menjadi penilaian standar internasional terhadap sistem tata kelola keamanan informasi dan perlindungan data.

"Kami memahami bahwa keamanan siber masih menjadi sebuah tantangan besar. Terlebih sejak terjadinya pandemi Covid-19, di mana masyarakat dipaksa melekat digital dan bergantung pada teknologi digital hingga berujung pada meningkatnya kejahatan siber. Dengan memiliki sertifikasi ISO 27001 menunjukkan bahwa kami telah melakukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi informasi nasabah, mengelola risiko keamanan informasi dari ancaman siber serta mencapai kepatuhan perlindungan informasi nasabah," ungkap *Chief Digital Officer* Allianz Life Indonesia Mike Sutton.

Berikut beberapa tips agar aman dari pencurian data pribadi secara *online* oleh Mike:

1. Jangan sembarangan menerima permintaan pertemanan di media sosial

Langkah baiknya apabila Anda menggunakan fitur *private* pada akun media sosial Anda. Dengan begitu, Anda dapat mengecek terlebih dahulu setiap orang yang ingin terkoneksi dengan Anda. Terlalu banyak memberikan informasi pribadi di laman profil juga sangat tidak disarankan untuk mencegah penipu mengakses informasi personal.

2. Jangan sembarang klik tautan mencurigakan

Jika menerima pesan yang tampak mencurigakan, sebisa mungkin jangan klik tautan apapun atau membuka lampiran dalam pesan tersebut. Peretas mungkin mencuri data Anda melalui tautan tersebut.

3. Jangan gunakan *password* yang mudah ditebak

Biasanya platform *online* menganjurkan pengguna untuk menggunakan *password* yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, huruf kapital serta simbol untuk meminimalisir *password* dapat ditebak dengan mudah. Selain memilih *password* yang tidak terlalu mudah, jangan lupa untuk mengganti *password* secara berkala.

4. Pastikan keamanan jaringan yang digunakan

Terkadang masyarakat terlena dengan tersedianya jaringan WiFi publik. Padahal, memakai jaringan WiFi publik tidak selalu aman karena sangat rentan disusupi *hacker* jahat yang mencuri data pribadi. Sangat disarankan untuk tidak menggunakan WiFi publik terutama saat melakukan transaksi pembayaran atau membuka akun bank. Dan pastikan *log out* setelah pemakaian.

5. Selalu perhatikan keamanan situs

Pastikan situs yang Anda kunjungi dimulai dengan alamat *https://* untuk menjamin keamanan situs. Pertukaran data dalam situs HTTPS terjaga dari perubahan dan pencurian.

6. Manfaatkan penggunaan notifikasi *login*

Notifikasi login berguna untuk menginformasikan jika ada pihak tak dikenal yang berusaha masuk ke akun Anda. Notifikasi ini biasanya akan dikirimkan melalui email / sms dengan menerangkan jenis gadget, lokasi dan waktu terjadinya login.

7. Aktifkan otentikasi dua langkah

Otentikasi dua langkah merupakan langkah verifikasi tambahan untuk masuk ke akun. Salah satu otentikasi dua langkah yang paling sering digunakan adalah kode OTP yang dikirim melalui SMS atau telepon dan jangan memberikan PIN maupun kode OTP ini kepada siapapun.

8. Jangan simpan data kartu kredit di *website* atau akun *e-commerce* yang tidak kredibel

Saat ingin mendaftarkan kartu kredit untuk pembayaran di *e-commerce* atau *online shop*, pastikan kredibilitas dari *website* dan perusahaan *e-commerce* atau *online shop* tersebut agar terhindar dari pembobolan kartu kredit. Jangan lupa untuk segera menghapus data kartu kredit seperti nomor kartu kredit, nama lengkap, nomor CVV sesaat setelah melakukan transaksi.